Nadiem Akan Diperiksa Kembali .....

Dari Halaman 1

pada Selasa (8/7) kemarin.

"Semua materi terkait apa yang sudah diperoleh penyidik selama ini baik berdasarkan dokumen, berdasarkan hasil penggeledahan dan penyitaan, maupun dari barang bukti elektronik," ujarnya kepada wartawan, Senin (14/7).

"Semua itu akan menjadi bahan konfirmasi, bahan pemeriksaan kepada yang bersangkutan bahkan kepada pihak manapun misalnya jika itu terkait dengan perannya," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Harli mengimbau agar Nadiem dapat memenuhi panggilan pemeriksaan lanjutan dari penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, pada Selasa (15/7) besok.

"Hingga saat ini kami belum menerima informasi apakah yang bersangkutan akan hadir atau tidak. Tetapi tentu kita harapkan bahwa yang bersangkutan hadir seperti beberapa waktu yang lalu," tuturnya.

Sebelumnya, penyidik telah menggeledah Kantor GoTo yang didirikan Nadiem pada Selasa (8/7) lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti.

Kendati demikian, Kejagung tak membeberkan lebih lanjut ihwal barang bukti yang disita. Harli menyampaikan saat ini penyidik masih mendalami berbagai barang bukti sitaan dari hasil penggeledahan tersebut.

Dalam kasus ini, Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Harli menyebut dalam kasus ini penyidik menemukan indikasi adanya pemufakatan jahat melalui pengarahan khusus agar tim teknis membuat kajian pengadaan alat TIK berupa laptop dengan dalih teknologi pendidikan.

Melalui kajian itu dibuat skenario seolah-olah dibutuhkan penggunaan laptop dengan basis sistem Chrome yakni Chromebook. Padahal hasil uji coba yang dilakukan pada tahun 2019 telah menunjukkan bahwa penggunaan 1.000 unit Chromebook tidak efektif untuk sarana pembelajaran.**(cnni/js)**

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.077 T .....

Dari Halaman 1

dengan pertumbuhan 10,4 persen pada April 2025.

Dalam keterangan resmi, Senin (14/7), BI menyebut kenaikan ULN pemerintah tersebut dipengaruhi oleh pembayaran jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) internasional.

Kenaikan juga dipicu peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi.

Berdasarkan sektor ekonomi, BI menyebut ULN pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,3 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,7 persen); jasa pendidikan (16,5 persen); konstruksi (12 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,7 persen).

Kedua, ULN swasta. Catatan BI ULN swasta mencapai US$196,4 miliar, utang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,4 persen(yoy).

Meski tumbuh 6,8 persen, BI menyebut ULN Indonesia aman. Pasalnya, rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terjaga sebesar 30,6 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,6 persen dari total ULN.**(cnni/js)**

Kuota Haji Bakal Diumumkan Hari Ini .....

Dari Halaman 1

Umrah yang tengah disusun oleh DPR bersama pemerintah.

"Besok tanggal 15 Juli ini pengumuman kuota haji, kemungkinan perpres akan keluar," ujar Cucun dalam acara Pengukuhan dan Rakernas I PB IKA-PMII Periode 2025-2030 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/7).

Ia mengatakan revisi regulasi tersebut merupakan bagian dari langkah besar dalam perombakan tata kelola haji di Indonesia.

Menurutnya, selama ini pelaksanaan haji cenderung berlangsung dengan pendekatan business as usual, terutama dalam aspek pengawasan yang dilakukan DPR.

"Ini revolusi besar tentang pelaksanaan ibadah haji. Kami lagi menyusun RUU tentang Revisi 8/2019 yang sering dari tahun ke tahun business as usual. Ributnya ya permasalahan kuota, permasalahan penanganan bagaimana kontraktual, yang tidak ada kontrak itu dalam diprotect karena DPR masuknya di ujung pengawasannya," katanya.

Cucun menilai pengawasan terhadap proses pemilihan hotel, katering, dan fasilitas lainnya selama ini hanya dilakukan pada tahap akhir pelaksanaan. Hal ini menyebabkan masalah yang terus berulang setiap tahunnya.

"Tidak dari proses bagaimana hotel yang disewa seperti apa, catering yang disewa seperti apa, kadang yang diperlihatkan di ujung, contohnya bagus ketika pelaksanaan karena ngurus orang banyak, akhirnya ya kejadian dari tahun ke tahun seperti itu," jelasnya.

"Dan tidak bisa menghindari daripada moral asas siapapun juga yang menjadi pengambil keputusan dalam pelaksanaan PPIH itu," tutur Cucun lebih lanjut.

Ia menjelaskan struktur kelembagaan yang menangani ibadah haji kini telah berubah. Pengelolaan yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama akan dialihkan kepada Badan Penyelenggara Haji (BPH).

"Bapak ibu sekalian yang kami lagi lakukan ini bagaimana apalagi sekarang dilepas dari Kementerian Agama sudah final strukturnya, tidak di Kementerian Agama tapi di Badan Penyelenggara Haji. Ya, sebentar lagi karena harmonisasi sudah selesai, Pak Presiden (Prabowo Subianto) sudah membuat BPH," ujar Cucun.

Ia menambahkan tahapan pembahasan RUU kini sudah kembali ke Komisi VIII DPR. Usulan RUU inisiatif DPR akan segera dibahas sambil menunggu keluarnya peraturan presiden (perpres) terkait kelembagaan baru.

"Tetapi karena siklus haji ini sudah berjalan di bulan Juli, besok tanggal 15 Juli ini pengumuman kuota haji, kemungkinan perpres akan keluar," kata dia.

Cucun mengatakan dalam rancangan perpres yang lama, BPH masih disebut bekerja bersama kementerian yang membidangi urusan agama. Namun, dalam perpres baru nanti, BPH akan menjalankan fungsi penuh secara mandiri.

"Kalau kemarin masih agak sedikit ambigu, perpres ini menekankan bahwa BPH menjalankan dengan kementerian yang membidangi agama, tapi nanti perpres baru akan full langsung ke Badan Penyelenggara Haji," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang juga anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji Abidin Fikri mengatakan DPR bersama pemerintah akan melakukan langkah strategis dengan merevisi dua undang-undang penting terkait haji.

Kedua UU itu adalah UU

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta UU Pengelolaan Keuangan Haji.

Menurut Abidin, revisi tersebut menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan ekosistem haji yang lebih adaptif terhadap kebijakan terbaru Pemerintah Arab Saudi.

"Dua undang-undang ini akan diubah secara sinergis. Kami perlu mendalami lebih jauh agar revisi yang dilakukan bisa menyesuaikan dengan kebijakan terbaru dari Arab Saudi, termasuk soal visa nonhaji yang kini dilarang masuk ke Kota Suci," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (9/6).

Ia menyebut kebijakan pembatasan visa nonhaji telah menimbulkan sejumlah persoalan, termasuk deportasi dan penahanan jemaah. Hal ini menurutnya menjadi sinyal perlunya regulasi nasional yang lebih terstruktur.

"Ke depan, kita perlu memastikan bahwa regulasi dan kemampuan kita mampu menjawab perubahan yang dilakukan Arab Saudi. Karenanya, UU Penyelenggaraan Haji dan UU Pengelolaan Keuangan Haji akan kami revisi dengan mempertimbangkan dinamika ini," ujar Abidin.**(cnni/js)**

Dirjen Pajak Pecat 7 Pegawai! .....

Dari Halaman 1

gan Komisi XI DPR RI, Senin (14/7/2025).

Bimo menekankan akan terus memperkuat integritas pegawai DJP. Ia mengaku tidak akan menoleransi tindakan kecurangan sekecil apapun.

"Kami kuatkan integritas pegawai DJP, zero tolerance terhadap fraud. Jadi kami sudah laporkan bahwa kami tidak pandang bulu, fraud Rp 100 pun kami akan tindak," tegasnya.

Penguatan kepercayaan publik adalah salah satu bentuk strategi optimalisasi penerimaan pajak tahun 2026. Jika wajib pajak lebih percaya, maka diharapkan secara sukarela akan membayar pajak.

Adapun total pegawai DJP terbaru mencapai 43.993 yang tersebar di 34 kantor wilayah (kanwil), 352 Kantor Pelayanan Pajak (KPP), 204 Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), serta 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh wilayah Indonesia. Pegawai DJP itu didominasi sarjana/D-IV dan S2/S3.**(det/js)**

Kejagung Belum Keluarkan DPO 'Raja Minyak' .....

Dari Halaman 1

langkah-langkah hukum selanjutnya. Jadi tidak bisa serta-merta misalnya dinyatakan DPO atau melakukan permintaan ekstradisi," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Harli mengatakan saat ini penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus akan segera melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap Riza Chalid.

Apabila yang bersangkutan kembali mangkir dari panggilan penyidik, kata dia, barulah upaya hukum paksa berupa penerbitan DPO ataupun Red Notice hingga ekstradisi akan ditempuh.

Kendati demikian, Harli menyebut penyidik telah melakukan pencekalan terhadap Riza di kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023.

"Supaya pihak imigrasi bisa melakukan monitoring terhadap lalu lintas perjalanan orang yang sudah dimintai pencekalan dan itu sekarang sedang berproses," tuturnya.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 18 tersangka. Belasan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga dan Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

Selain itu, Kejagung juga menetapkan saudagar minyak Mohammad Riza Chalid selaku Beneficial Owner dari PT Orbit Terminal Merak (OTM) dan anaknya Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

Kejagung menyebut total kerugian negara dalam perkara korupsi tersebut mencapai Rp285 triliun yang terdiri dari kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara.**(cnni/js)**

Sekolah Rakyat Telah .....

Dari Halaman 1

calon siswa pun sudah dilakukan di Jakarta dan Bekasi selama dua hari, 9-10 Juli lalu.

Total ada 63 Sekolah Rakyat yang akan mulai matrikulasi pada hari ini. Sedangkan 37 lainnya akan menyusul pada akhir bulan.

"Ada 63 titik yang sudah siap, salah satunya di Sentra Abiyoso," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul seperti dilansir dari laman resmi Kemensos RI, Senin.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 126/HUK/2025, Jakarta memiliki tiga titik rintisan: Sentra Handayani, Sentra Mulya Jaya, dan Pusdiklatbangprof Kemensos Margaguna.

Di Jawa Barat, terdapat 13 titik rintisan lainnya, seperti STPL Bekasi, Sentra Phalamarta Sukabumi, Sentra Abiyoso Cimahi, PSBR UPT Dinas Sosial Cibabat, Sentra Wyataguna Bandung (Padjajaran dan Cisarua Lembang).

Kemudian, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Sentra Galih Pakuan Bogor, Sentra Terpadu Inten Soeweno Cibinong, SMPN 18 Kota Cirebon, Balai Diklat Kesejahteraan Sosial Bandung Lembang, UPTD Balai Latihan Kerja di Sumedang, serta fasilitas di Kompleks SOR Jalak Harupat.

Pemerintah juga tengah mematangkan 100 titik tambahan dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan total 200 titik, program ini ditargetkan dapat menjangkau lebih dari 20 ribu siswa dari keluarga tidak mampu dan memberikan program pemberdayaan bagi orang tua mereka.

Kepala Sekolah Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Jakarta Timur yang berada di Sentra Handayani, Regut Sutrasto menyatakan pihaknya siap menyambut tahun ajaran baru setelah dua hari simulasi yang berjalan lancar.

Regut turut memastikan semua fasilitas sarana dan prasarana untuk program sekolah rakyat itu pun sudah siap.

"Kami sepertinya sudah siap. Mungkin bisa lihat, sudah siap semuanya. Kamar mandi ada, sudah. Dengan lab ini, sudah siap semua. Terus di atas ada lab komputer. Ini masing-masing ada lab-nya, laptop-nya, smartphone-nya, sudah siap. Cuma nanti kita memang, biar nanti mempersiapkan lagi, nanti tanggal 14 kita sudah siap lagi," kata Regut kepada CNNIndonesia.com di sekolah rakyat tersebut,Kamis (10/7).**(cnni/js)**

Cari Aman, Tidur di Polres Langkat .....

Dari Halaman 1

arga saya trauma berat," kata Sinarta dengan suara gemetar.

Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Pandu H.W. Batubara, S.I.K., M.H., membenarkan adanya laporan ancaman pembunuhan terhadap Sinarta dan keluarganya.

"Laporan sudah kami terima dan sedang ditangani. Saat ini keluarga korban masih menginap di Polres Langkat untuk alasan keamanan," jelas AKP Pandu saat dikonfirmasi via WhatsApp, Minggu (13/7/2025).

Ancaman tersebut membuat keluarga Sinarta trauma berat. Mereka kini membutuhkan perlindungan ekstra dari aparat penegak hukum.

"Kami tidak berani pulang ke rumah. Anak-anak terus menangis ketakutan. Kami hanya ingin keadilan dan rasa aman," ujar istri Sinarta dengan mata berkaca-kaca.

Kejadian ini juga membuat warga Desa Namo Sialang resah. Sejumlah tetangga Sinarta menyatakan dukungan dan meminta polisi segera menindak tegas pelaku.

"LS dan kelompoknya sudah sering bikin masalah. Kami minta polisi bertindak sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan," kata seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Polres Langkat menjamin keamanan keluarga Sinarta sambil melanjutkan penyelidikan. Masyarakat diimbau untuk tidak mengambil tindakan main hakim sendiri.

"Kami akan usut tuntas kasus ini. Masyarakat harap tenang dan percayakan kepada kami," tegas AKP Pandu.

Keluarga Sinarta berharap ancaman ini segera dituntaskan agar mereka bisa kembali hidup normal tanpa rasa takut.**(A-10)**

Ledakan Guncang .....

Dari Halaman 1

kantor berita Fars, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (14/7/2025), mengatakan ledakan itu bukan akibat serangan militer Israel.

"Empat unit hunian mengalami kerusakan akibat ledakan tersebut. Penilaian awal menunjukkan bahwa penyebab insiden tersebut adalah kebocoran gas, dan tindak lanjut terkait hal ini masih terus dilakukan," sebut direktur pemadam kebakaran kota Qom saat berbicara kepada kantor berita Fars.

Disebutkan dinas pemadam kebakaran setempat bahwa penghuni gedung permukiman yang dilanda ledakan tersebut adalah warga biasa.

Israel, musuh bebuyutan Iran, memiliki rekam jejak pembunuhan ilmuwan nuklir Iran, yang mereka anggap sebagai bagian dari program yang secara langsung mengancam Tel Aviv. Teheran telah berulang kali menegaskan bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan damai.

Pada 13 Juni lalu, Israel melancarkan operasi pengeboman besar-besaran terhadap target militer dan nuklir Iran, yang memicu kekhawatiran akan konflik regional yang lebih luas.

Perang antara Iran dan Israel itu juga menyeret Amerika Serikat (AS), yang melancarkan pengeboman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap tiga fasilitas nuklir Teheran, yakni Fordow, Isfahan, dan Natanz.

Pertempuran udara itu berhenti setelah kedua negara sepakat untuk melaksanakan gencatan senjata yang dimediasi AS, yang berlangsung sejak 24 Juni lalu.**(det/js)**

Musuh Abadi

Dari Halaman 1

gis dan geopolitik. Al-Qur'an tidak menyebut nama negara atau tokoh, tetapi menyentuh akar relasi antar umat. Penegasan tentang "permusuhan yang paling keras" tentu tidak datang tanpa makna.

Pertama-tama, penting dicatat bahwa Al-Qur'an tidak menyalahkan etnis atau ras, tetapi menyalahkan perilaku kolektif yang membangun permusuhan terhadap iman. Dalam sejarah kenabian, kaum Yahudi memang tercatat sering berkonfrontasi secara ideologis dengan para Nabi, termasuk dengan Nabi Muhammad di Madinah.

Namun, sikap permusuhan ini bukan ciri semua individu Yahudi. Bahkan dalam Al-Qur'an sendiri, ada ayat-ayat lain yang menyebut di antara mereka ada yang jujur, adil, dan beriman kepada Allah.

Permusuhan yang disebut dalam ayat ini bersifat ideologis dan politis, bukan berdasarkan darah atau suku. Maka, umat Islam tidak boleh menjadikan ayat ini sebagai alasan untuk membenci semua orang Yahudi secara membabi buta. Justru yang harus dikritik adalah sistem dan kekuasaan zalim yang menindas kebenaran.

Dalam konteks modern, sebagian mufassir kontemporer menafsirkan ayat ini dalam kerangka konflik antara Zionis Israel dan rakyat Palestina. Penjajahan, pembunuhan sipil, blokade kemanusiaan, hingga penghinaan terhadap masjid-masjid suci adalah cerminan nyata dari permusuhan yang Al-Qur'an gambarkan.

Permusuhan ini bukan hanya dalam bentuk senjata, tapi juga dalam bentuk narrative war: propaganda di media, manipulasi sejarah, hingga kriminalisasi solidaritas terhadap Palestina. Maka, ayat ini bisa dianggap sebagai peringatan dini bagi umat Islam agar tidak naif terhadap upaya sistemik untuk melemahkan kekuatan iman, ukhuwah, dan keadilan.

Namun, ayat ini tidak dimaksudkan agar umat Islam menjadi paranoid. Justru ini adalah ujian kedewasaan umat: apakah kita akan merespons dengan kebencian membuta, atau dengan kecerdasan spiritual dan strategi moral?

Permusuhan yang keras harus dijawab dengan keteguhan iman dan strategi dakwah, bukan dengan sekadar retorika atau emosi semata. Kita harus mampu membedakan antara musuh ideologis dan warga biasa yang tidak terlibat dalam kebijakan zalim. Inilah tantangan besar dakwah Islam abad ini: tetap tegas dalam prinsip, namun adil dalam perlakuan.

Uniknya, lanjutan ayat tersebut justru menyebut: Dan kamu dapati yang paling dekat kasih sayangnya kepada orang-orang beriman adalah orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya kami ini orang Nasrani'..."

Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak generalisasi. Ia menyebut siapa yang paling keras permusuhannya, tapi juga menyebut siapa yang paling dekat kasih sayangnya. Artinya, dalam dunia yang kompleks, umat Islam dituntut bersikap cermat, tidak terjebak dalam dikotomi palsu.

QS Al-Ma'idah ayat 82 bukan hanya potret masa lalu, tapi juga cermin untuk menatap masa depan. Bahwa tantangan terhadap iman dan umat Islam akan terus ada, dari berbagai arah, namun respons kita tidak boleh kehilangan arah: tetap adil, cerdas, dan berpegang pada prinsip.

Dalam menghadapi permusuhan, umat Islam harus bersatu, berpikir strategis, dan meneguhkan iman tanpa kehilangan akhlak. Sebab kekuatan Islam bukan hanya pada jumlah dan senjata, tapi pada kebijaksanaan dan keteguhan kebenaran.